

363.2

JAL

1

TUGAS KEPOLISIAN R.I.
DALAM MENYELENGGARAKAN KAMTIBMAS
DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR MRANGGEN

Disusun oleh :

ABDUL JALIL, SH.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996

Makalah disampaikan dalam Seminar Hasil-hasil Penelitian,
Lembaga Penelitian Undip, 8 Februari 1996.

TUGAS KEPOLISIAN R.I.
DALAM MENYELENGGARAKAN KAMTIBMAS
DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR MRANGGEN.

I. PENDAHULUAN.

Pembangunan sesungguhnya merupakan suatu proses perubahan sosial yang direncanakan (planned) dan dikehendaki (intended), sehingga dalam penyelenggaraannya pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan berencana. Pembangunan yang sedang kita laksanakan tidak hanya menyangkut bidang fisik-material saja tetapi juga menyangkut bidang mental-spiritual. Tegasnya, pembangunan nasional kita bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, sejahtera lahir dan batin.

Sebagai akibatnya, tidak satupun bidang kehidupan masyarakat tidak tersentuh oleh roda pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, ada satu hal yang dapat ditarik dalam pengertian ini ialah bahwa kehidupan masyarakat pada dewasa ini terasa semakin kompleks yang diwarnai oleh berbagai perubahan dalam masyarakat. Berbagai ciri dari perubahan sosial itu pada umumnya adalah usaha perombakan terhadap tatanan sosial lama yang sudah mapan kearah pola hidup yang baru, sehingga dalam kondisi seperti ini terdapat situasi sosial yang mendorong kearah kemajuan seperti : pertumbuhan pengetahuan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, akan tetapi tidak jarang timbul pula implikasi negatif yang terjadi seperti terjadinya konflik sosial. Implikasi-implikasi negatif ini merupakan resiko dari pembangunan yang harus diperhitungkan sebelumnya. Dengan demikian pembangunan mempunyai implikasi yang sangat kompleks bagi kehidupan masyarakat.

Bertambah kompleksnya masalah-masalah ekonomi, pesatnya kemajuan di bidang teknologi, meningkatnya populasi penduduk serta bertambahnya fasilitas di bidang komunikasi dan transportasi mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas pertemuan antara individu yang satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingannya. Disamping itu karena adanya perbedaan status sosial-ekonomi dalam masyarakat, buda-

ya, serta latar belakang pendidikan, memungkinkan timbulnya kecemburuan sosial ataupun konflik antara individu yang satu dengan yang lain, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang dibina. Untuk itu situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat perlu terus diwaspadai.

Situasi Kamtibmas pada hakekatnya merupakan hasil dari perkembangan sosial dan faktor-faktor korelatif yang menjadi penyebab timbulnya gangguan maupun kriminalitas yang beraspek Ipoleksosbud Hankam, baik di lingkungan yang bersifat lokal maupun nasional, bahkan internasional. Sebagai fenomena sosial, gangguan Kamtibmas, khususnya kejahatan telah lama menjadi bahan penelitian oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu, walaupun belum ada satu kesepakatan yang bulat mengenai penanggulangan kejahatan ini. Berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan Kamtibmas antara lain : faktor ekonomi, sosial budaya, politik dan kemampuan aparat penegak hukum (Polisi). Disamping itu partisipasi masyarakat di dalam rangka Kamtibmas ini sangat penting sebagai pendukung dan pengemban cita-cita nasional sesuai dengan pasal 30 UUD 1945.

Tujuan negara kita dengan melalui pembangunan ini tidak lain adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yakni tata tentrem kerta raharja, bahagis lahir dan batin. Untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat (raharja), maka harus dilakukan melalui kerja keras (kerta), yang dijamin oleh adanya rasa aman dan damai (tentrem) sehingga semua proses dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (tata). Untuk mewujudkan kesemuanya ini dituntut kehadiran petugas-petugas Polri yang dengan gigih berusaha melaksanakan kewajibannya dengan bekerja bersama sama dan saling membantu dengan kekuatan/unsur-unsur dinamis yg ada dalam masyarakat.

Tugas dan fungsi polisi (Polri) dalam masyarakat ini secara yuridis telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu : UU No.13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian RI yaitu khususnya dalam ps.1 ayat 1,2 dan pasal 2; Keppres RI Nomor 52 tahun 1969 pasal 4 juncto Keppres RI Nomor 7/1974 pada pasal 31.

Dari berbagai peraturan yang mengatur mengenai tugas Polri dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa tugas Polri adalah sebagai aparat negara penegak hukum, yang terutama bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini Polri mempunyai kedudukan sebagai inti Binkamtibmas dan sebagai aparat pembina teknis Binkamtibmas. Dalam kedudukannya tersebut Polri mempunyai peran yang sangat strategis/penting, dan ia (Polri) senantiasa berhubungan langsung dengan masyarakat dan berada di tengah-tengah masyarakat yang dilayaninya. Konsekuensinya, ia menerima sorotan yang tajam dari masyarakatnya. Disamping itu, di dalam prakteknya, pelaksanaan tugas Polri banyak berhadapan dengan masalah kemanusiaan, sehingga seringkali bersinggungan dengan masalah hak azasi manusia.

Dalam kaitannya dengan tugas Polri ini (yang secara formal telah diatur dalam berbagai peraturan tersebut), penulis ingin melihat secara khusus bagaimana pelaksanaan tugas Polri di wilayah kecamatan Mranggen. Mengingat daerah ini sekalipun secara administratif termasuk dalam wilayah Kab. Dati II Demak tetapi secara geografis letak kecamatan Mranggen ini lebih dekat dengan Kodia Dati II Semarang (berbatasan dengan Kodia Semarang), sehingga perkembangan daerah ini cukup pesat. Mranggen merupakan daerah penyangga sekaligus pintu masuk ke Semarang dari arah timur/tenggara. Apalagi ditunjang dengan pengembangan wilayah Semarang bagian timur/tenggara, wilayah ini menjadi semakin pesat perkembangannya, terutama dalam kurun waktu sepuluh - lima belas tahun terakhir. Keadaan demikian ini pada gilirannya akan melahirkan problem-problem sosial yang semakin kompleks, dan memunculkan kerawanan dalam bidang Kamtibmas.

II. PERMASALAHAN.

Dari uraian dalam pendahuluan di atas, ada beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan dan sekaligus ingin dicoba dijawab dalam makalah (hasil penelitian) ini. Adapun permasalahannya adalah meliputi sbb:

1. Bagaimanakah (gambaran) pelaksanaan tugas Kepolisian RI di wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) Mranggen?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menyelenggarakan Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
3. Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh Polri guna menunjang tugas Polri dalam menyelenggarakan Kamtibmas di wilayah ini, mengingat wilayah (masyarakat) Mranggen ini sedang mengalami perubahan sosial yang besar..

III. PEMBAHASAN.

A. Gambaran Umum Wilayah Kerja Polsek Mranggen.

Kecamatan Mranggen Kab. Dati II Demak terdiri dari 19 desa. Wilayah kecamatan ini terletak di bagian barat daya wilayah Kab. Demak, yang berbatasan dengan wilayah Kodia Dati II Semarang, dan yang menghubungkan langsung wilayah ini dengan wilayah Kodia Semarang. Dari 19 Desa yang ada, sebagian besar merupakan dataran rendah dan hanya sebagian kecil yang berupa hutan dan dataran tinggi (bukit). Daerah (desa) yang berhutan hanya ada dua desa yaitu desa Banyumeneng dan desa Sumberejo, sedangkan daerah perbukitan ada di sebagian wilayah desa Kebonbatur dan Batusari (lokasi Perumnas Bumi Pucang Gading).

Pada umumnya wilayah kecamatan Mranggen ini cocok untuk lahan pertanian, sehingga sebagian besar penduduknya hidup bertani dan budaya masyarakatnya dengan sendirinya adalah budaya hidup agraris (yang dominan). Adapun karakteristik perkembangan daerahnya adalah seperti diuraikan berikut. Karena wilayah kecamatan Mranggen ini berbatasan dengan Kodia Semarang dan merupakan pintu masuk ke Semarang melewati jalur timur (Purwodadi-Semarang), maka wilayah Mranggen ini berkembang cukup pesat. Apalagi ditunjang dengan pengembangan wilayah Semarang bagian timur/tenggara, hal ini sangat terasa pengaruhnya terhadap perkembangan wilayah kecamatan Mranggen. Berikut ini akan disajikan deskripsi daerah/wilayah kecamatan Mranggen.

- Sebagian besar wilayah kecamatan Mranggen terdiri dari desa-desa yang mempunyai basis pertanian dan masyarakatnya sebagian besar hidup dan mempunyai mata pencaharian bertani. Tetapi ada sebagian desa yang lain, yang berkembang cukup pesat yaitu desa-desa yang terletak di jalur jalan raya Semarang-Purwodadi, dimana desa-desa tersebut (masyarakatnya) sudah tidak dominan lagi menampakkan karakteristik desa. Desa-desa tersebut sudah lebih menampakkan ciri-ciri kota, terutama dilihat dari perkembangan fisik wilayahnya. Adapun desa tersebut adalah Bandungrejo, Mranggen, Batusari, Kembangarum dan Brumbung.

- Suatu hal yang patut dicatat dalam kaitannya dengan pengaruh perkembangan wilayah Mranggen ini adalah munculnya pabrik-pabrik/perusahaan industri yang berkembang pesat di wilayah ini. Berdasarkan pengamatan peneliti, ditemukan hampir mencapai jumlah ratusan pabrik/perusahaan yang tersebar di beberapa desa di wilayah ini. Perusahaan tersebut memproduksi berbagai macam barang dan jasa. Munculnya banyak pabrik/perusahaan ini memang logis karena daerah ini dekat sekali dengan pusat perdagangan/pemasaran di Semarang. Wilayah Mranggen ini terletak \pm 12 Km dari Simpang lima Semarang. Dari segi ekonomi, wilayah ini sangat strategis karena biaya transportasi relatif lebih murah karena jaraknya tidak jauh. Dengan kondisi jalan yang mulus dan lebar (\pm 26m) maka transportasi tidak akan mengalami hambatan.
- Selain itu, di wilayah ini juga bermunculan kompleks perumahan seperti: Pondok Majapahit I Bandungrejo, Pondok Majapahit II Mranggen, Perumahan Batusari Asri, Perumnas Bumi Pucang Gading di Batusari dan Plamongan Indah yang ekspansi ke timur. Perumahan-perumahan tersebut nampaknya terus melakukan ekspansi sehingga melahap lahan-lahan yg ada di sekitarnya.

Dengan demikian dari segi perkembangan fisik, pembangunan di wilayah Mranggen menunjukkan/menampakkan kemajuan yang pesat. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, transportasi, komunikasi, cukup baik/maju dibandingkan dengan kecamatan lainnya (kecuali kec. Kota) dan Sayung) di wilayah kabupaten Demak. Fasilitas listrik telah dinikmati oleh semua desa di wilayah kecamatan ini. Sedangkan fasilitas telepon juga sudah dinikmati oleh beberapa desa, khususnya yang berlokasi di dekat jalan raya Semarang-Purwodadi. Kesemuanya ini menunjang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari segi perkembangan masyarakat (SDM) juga mengalami perkembangan yang mengembirakan. Dilihat dari segi pendidikan, tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di wilayah Mranggen cenderung semakin meningkat. Sebagai gambaran, di

wilayah kecamatan Mranggen terdapat sedikitnya 9 buah SLTA dan lebih dari 20 buah SLTP (baik umum maupun agama). Dari 19 desa yang ada, hanya 3 desa yang belum mempunyai lembaga pendidikan setingkat SLTP yaitu MTs, sedangkan desa lainnya telah ada MTs bahkan ada juga yang memiliki SMP.

Suatu perkembangan lain yang seringkali dapat merugikan adalah terjadinya perubahan (melunturnya) nilai-nilai lama yang sudah mapan karena pengaruh modernisasi dan derasnya informasi serta lancarnya komunikasi. Keadaan masyarakat yang demikian ini seringkali menimbulkan konflik/ketegangan yang diakibatkan belum adanya atau sulitnya menentukan nilai-nilai mana yang dijadikan sebagai patokan oleh sebagian besar masyarakat.

B. Permasalahan yang muncul.

Seiring dengan pembangunan dan perkembangan masyarakat di wilayah kecamatan Mranggen sebagaimana diuraikan di atas, ternyata muncul masalah-masalah baru yang sebelumnya bisa dikatakan belum pernah ada/terjadi. Masalah-masalah baru yang muncul bersamaan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat ini merupakan tantangan bagi Polri (d.h.i. Polsek Mranggen), untuk dapat mengatsi dan menyelesaikannya dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban. Adapun masalah-masalah yang muncul saat ini berdasarkan informasi dari Kapolsek adalah :

- Jumlah penduduk kecamatan Mranggen cenderung terus meningkat tajam seiring dengan munculnya kompleks-kompleks perumahan. Dengan munculnya para pendatang dari berbagai daerah yang berbeda, suku, serta agama yang berbeda, maka heterogenitas penduduk menjadi makin beragam dan keadaan masyarakat menjadi semakin kompleks. Keadaan demikian memungkinkan terjadinya benturan nilai maupun konflik budaya yang dapat menimbulkan ketegangan dan gangguan Kamtibmas lainnya.
- Meningkatnya jumlah penduduk identik dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja dan kebutuhan akan lapangan kerja, sehingga dengan demikian menimbulkan masalah ketenaga kerjaan (pengangguran). Keadaan demikian dari sudut pandang Kamtibmas adalah potensial rawan.
- Munculnya pabrik-pabrik yang cenderung ekspansif akhirnya

melahap habis tanah-tanah penduduk yang ada di sekitarnya. Keadaan ini memunculkan apa yang disebut spekulasi-spekulasi (cálo) tanah yang seringkali merugikan penduduk/pemilik tanah.

- Pemilik tanah yang tergusur yang semula hidup bertani pada akhirnya harus alih profesi/pekerjaan atau berubah status menjadi penggarap/buruh tani, buruh bangunan, buruh industri atau jenis pekerjaan lainnya. Hal demikian sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan sehingga sering menimbulkan masalah dikemudian hari.
- Anak-anak muda yang cenderung ingin begaya hidup modern yang konsumtif, yang disertai dengan mudahnya (longgarnya) nilai-nilai etika/keagamaan sering menimbulkan akibat-akibat yang negatif dan pada akhirnya dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat serta Kamtibmas.
- Munculnya pabrik/perusahaan, disamping memberikan keuntungan berupa tersedianya lapangan kerja bagi para pencari kerja, disisi lain juga sering menimbulkan masalah serius yaitu pencemaran lingkungan. Daerah sekitar berdirinya pabrik adalah daerah yang potensial rawan terhadap terjadinya polusi, baik polusi air, polusi tanah, polusi udara maupun polusi suara (bising).

Masalah-masalah yang muncul sebagaimana diungkapkan oleh Kapolsek, sebenarnya hanya sebagian saja dari seluruh permasalahan yang ada dan terjadi. Dalam hal ini Polsek telah berusaha mengantisipasi keadaan dan telah berusaha melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya, seperti Koramil maupun kecamatan.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Polsek mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Polsek Mranggen adalah sebagai berikut. Jumlah anggota Polsek sebanyak 14 personil yang dipimpin oleh seorang komandan. Dari 14 personal yang ada, 4 orang diantaranya berpangkat tamtama, sedangkan 9 lainnya berpangkat bintara (dari Serda sampai Serma). Sedangkan Kapolseknya berpangkat Letda. Untuk mendukung aktifitas anggota, hanya tersedia 1 buah sepeda motor Honda GL 125, serta didukung dengan beberapa bu-

ah alat komunikasi HT. Di kantor Polsek yang terletak di jalan raya Mranggen tersedia 3 buah mesin ketik serta beberapa ruangan yang sebenarnya kurang memadai untuk mendukung aktivitas anggota. Sementara di belakang kantor Polsek digunakan sebagai tempat tinggal (asrama) oleh beberapa orang anggota, meskipun sebenarnya kurang memenuhi syarat kesehatan.

Dari segi pendidikan, dari sebanyak 14 anggota, 10 orang diantaranya berpendidikan setingkat SLTA sedangkan 4 orang lainnya berpendidikan SLTP. Sementara itu yang berpendidikan setingkat akademi tidak ada. Dengan memanfaatkan segenap kekuatan yang ada dan fasilitas yang dimiliki inilah Polsek berusaha untuk mengatasi setiap gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

C. Tugas Polri dalam Menyelenggarakan Kamtibmas.

Tugas Polri dalam menyelenggarakan Kamtibmas ini didasarkan pada UU No.13/1961 yaitu ps.1 (1,2), ps.2 dan ps.18. Kemudian tugas Polri ini ditegaskan lagi dalam ps.4 Keppres RI No.52/1969 yang berbunyi : Dalam kedudukan tersebut Kepolisian RI bertugas serta bertanggung jawab sebagai alat negara penegak hukum, terutama di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan di dalam UU Pokok Kepolisian serta dalam bidang kekaryaan sebagai kekuatan sosial politik. Lebih lanjut Keppres RI No.7/1974 ps.31 menyebutkan :

"Kepolisian negara RI disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala usaha dan kegiatan mengamankan kebijakan departemen dalam rangka melaksanakan segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara penegak hukum, terutama di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan UU No.13 Tahun 1961 dan Keppres RI No.52/1969".

Selain itu, tugas Polri ini juga diatur dalam UU No.20 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan dan Keamanan Negara yaitu pada pasal 30 (4).

Dari beberapa peraturan yang disebutkan di atas, selanjutnya tugas Polri ini dijabarkan dalam berbagai peraturan yg secara hirarchis adalah merupakan penjabaran dari peraturan yang ada di atasnya. Tugas Polri untuk menyelenggarakan dan membina Kamtibmas ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota Polri, karena keamanan dan ketertiban ma-

syarakat merupakan syarat mutlak bagi adanya masyarakat yang teratur. Sebab dengan keadaan yang aman dan tertiblah warga masyarakat dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya dengan baik. Oleh karena itu kehadiran anggota Polri di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat memelihara Kamtibmas sebagaimana digariskan dalam berbagai peraturan tersebut di atas.

1. Langkah-langkah yang Diambil.

Sehubungan dengan masalah gangguan Kamtibmas di wilayah ini, Polsek Mranggen sebagai aparat yang paling bertanggung jawab terhadap gangguan Kamtibmas, telah mengantisipasi keadaan dan telah mengambil tindakan-tindakan, baik yang bersifat preventif maupun represif kepolisian. Melalui fungsi-fungsi di dalam tubuh organisasi Polri, telah diambil kebijakan untuk menghadapi berbagai keadaan. Menurut penjelasan dari Kapolsek dan beberapa anak buah yang diwawancarai mengatakan bahwa Polri telah menyiapkan fungsi-fungsi kepolisian yaitu::

- Samapta Bhayangkara.

Tugas Samapta Polisi adalah menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan mengenai pembinaan kekuatan, sarana dan kemampuan serta menyelenggarakan kegiatan preventif berupa patroli, penjagaan, pengawalan/pengawasan dan lain-lain untuk melaksanakan pencegahan terhadap terjadinya kriminalitas atau ancaman terhadap Kamtibmas, dan tugas penindakan apabila diperlukan. Sehubungan dengan banyaknya kasus pembebasan tanah/jual beli tanah, Polri berperan melakukan penjagaan dan memantau keadaan dan bila diperlukan juga mengawal orang-orang yang telah menerima pembayaran uang. Begitu juga dalam kasus terjadinya pencemaran maupun kasus lainnya. Kehadiran polisi diperlukan jangan sampai terjadi tindak pidana. Misalnya terjadinya penganiayaan (tindakan brutal) oleh massa.

- Reserse.

Fungsi reserse adalah memberantas kriminalitas dengan cara berusaha mencari dan menemukan pelaku serta mengungkap kasus dan motif tindak pidana. Mengingat semakin meningkatnya kualitas kejahatan dan semakin beragamnya modus operandi kejahatan, maka kemampuan petugas reserse ini harus selalu ditingkatkan melalui berbagai macam cara, terutama melalui pendidikan khusus/kejuruan.

- Intelijen dan Pengamanan.

Peranan Intelpampol dalam menghadapi kasus-kasus yg terjadi adalah dengan melakukan kegiatan deteksi terhadap sumber kejadian yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap situasi Kamtibmas maupun gangguan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

- Lalu Lintas.

Tugas Polantas adalah menyelenggarakan segala kegiatan dan pekerjaan mengenai kelalu-lintasan. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menegakkan disiplin dan peraturan lalu lintas, menangani setiap pelanggaran dan segala sesuatu yang menyangkut lalu lintas. Hal ini dimaksudkan agar tercapai tujuan yaitu keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamtibcarlantas). Sehubungan dengan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah ini, maka petugas terus melakukan pemantauan daerah/lokasi yang rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Dalam hal ini, jalan raya Mranggen-Semarang, terutama sekitasr pasar Mranggen (depan pasar), pasar sepeda, pasar Ganepo (depan Kantor Perhutani Mranggen), intasan Kereta api, merupakan daerah yang rawan kemacetan dan kecelakaan Lalin, terutama pada jam-jam berangkat dan pulang kerja.

- Binmas.

Fungsi Binmas Polisi adalah menyelenggarakan segala usaha kegiatan dan pekerjaan mengenai kekuatan, sarana dan kemampuan serta menyelenggarakan pencegahan terhadap kriminalitas maupun ancaman terhadap Kamtibmas dan secara aktif menciptakan kondisi aman dan tertib dalam masyarakat. Fungsi ini menyangkut segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat dalam rangka ikut serta secara aktif mengusahakan ketaatan masyarakat terhadap peraturan per-UU-an yg berlaku, serta menjadikan masyarakat mampu mengamankan diri dan lingkungannya dalam bentuk keamanan swakarsa. Masyarakat ditumbuhkan kesadarannya terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga potensi-potensi masyarakat berkemampuan riil mencegah dan menangkal ancaman/gangguan Kamtibmas. Sasaran fungsi Binmas ini meliputi baik individu, kelompok mau-

pun lingkungan. Pola kegiatan yang dilakukan oleh Binmaspol :

1. Sambang dan tatap muka.

Dilakukan kepada baik individu maupun kelompok, dengan cara mendatangi mereka/mengunjungi. Mengunjungi tokoh masyarakat (kyai, Kades, perangkat dll) dan kelompok masyarakat seperti melalui pengajian (kelompok), melalui sekolah dll.

2. Penerangan masyarakat.

Memberitahukan sesuatu yang bersifat petunjuk, baik melalui media massa cetak maupun elektronika.

3. Bimbingan dan Penyuluhan.

Kegiatan dalam rangka usaha menolong individu dan kelompok dalam masyarakat untuk dapat keluar dari kesulitan yg dihadapi. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menarik simpati masyarakat sehingga masyarakat akan berpartisipasi dalam masalah Kamtibmas.

Disamping fungsi-fungsi diatas, suatu langkah yang diambil Polda Jateng dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Kamtibmas dalam rangka tugas preventif kepolisian, adalah dengan menerjunkan bintanga polisi ke desa-desa/kelurahan yg kemudian disebut Babinkamtibmas. Babinkamtibmas ini merupakan pilot project di Polda Jateng 6-7 tahun lalu.

Sementara untuk pelaksanaannya di wilayah Polsek Mranggen telah dilaksanakan sejak ± 6 tahun lalu. Dari 19 desa yang ada, telah diterjunkan sebanyak 13 bintanga polisi sebagai Babinkamtibmas. Jumlah ini memang kurang untuk saat ini, sehingga ditempuh cara "dirangkap". Jadi ada tujuh orang petugas yang merangkap bertugas di dua desa. Sebenarnya pada 1985 anggota Polsek Mranggen pernah mencapai jumlah personil sebanyak 24 orang, tetapi karena dipindah tugaskan, kini tinggal 14 personil. Para bintanga yang diterjunkan ini umumnya masih berusia muda (antara 20-35 tahun) dan berpendidikan minimal SLTA, serta telah dididik dalam pendidikan kejuruan Binmas atau intel. Dengan ditempatkannya para bintanga yg masih muda ini diharapkan aktifitas dan mobilitasnya dapat dilakukan semaksimal mungkin sehingga kondisi Kamtibmas akan semakin mantap dan terkendali.

Dari hasil wawancara, dengan beberapa orang petugas Babinkamtibmas diperoleh keterangan bahwa, pada awal mulai dilak-

sanaknya tugas sebagai Babinkamtibmas banyak mengalami hambatan, terutama yg. bersumber dari masyarakat, karena belum dipahaminya tugas Polri dalam masyarakat. Sikap masyarakat cenderung menaruh rasa curiga dan berusaha menghindari (enggan) bertemu dan berhubungan dengan polisi. Tetapi setelah melalui proses perjalanan yang panjang, dengan penjelasan-penjelasan yg diberikan kepada mereka, maka perlahan namun pasti mereka menerima baik kehadiran petugas di tengah-tengah mereka. Namun demikian bukan berarti bahwa tugas ini tanpa hambatan. Hambatan masih saja muncul, terutama masalah partisipasi masyarakat.

Kunjungan ke desa-desa dilakukan rutin setiap bulan 3-4 kali untuk desa yang jaraknya jauh, sedangkan desa yang lebih rawan, frekuensi kunjungan lebih sering. Desa-desa yg sudah maju memang relatif lebih rawan, sehingga pemantauannya lebih intensif. Kendala masalah transportasi bagi petugas yang bertugas di desa yg cukup jauh merupakan problem klasik. Untuk itu ditempuh upaya semacam "informan" (banpol) yang diberi alat komunikasi untuk memantau dan melaporkan pada Polsek jika terjadi sesuatu gangguan Kamtibmas.

2. Hambatan-hambatan yang Ditemui.

Penyelenggaraan Kamtibmas di wilayah Polsek Mranggen secara umum tidak banyak menghadapi masalah serius, karena aparat kepolisian sebagai inti Binkamtibmas telah mengantisipasi, disamping koordinasi yg mantap antara berbagai instansi terkait. Tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat dalam bidang Kamtibmas. Dengan adanya koordinasi yg baik antara berbagai instansi terkait serta ditunjang dengan partisipasi masyarakat, maka penyelenggaraan Kamtibmas dapat berjalan dengan baik, meskipun disana-sini masih ditemukan adanya hambatan.

Pada umumnya hambatan yang muncul adalah :

a. Rendahnya partisipasi masyarakat.

Hal ini disebabkan oleh karena kecenderungan budaya individualis yang terjadi dalam masyarakat modern/transisi, yang ditandai dengan melemahnya ikatan komunal dan solidaritas sosial diantara anggota masyarakat. Disamping itu belum dipahami benar oleh masyarakat bahwa menjaga keamanan dan ketertiban tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Polri, a-

kan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Polri hanya sebagai aparat inti Binkamtibmas. Tanpa bantuan dari masyarakat, sulit kiranya tugas Polri dapat berhasil dengan baik.

b. Perbandingan jumlah penduduk dengan Personil Polri.

Dibandingkan dengan jumlah penduduk di kecamatan Mranggen yg berjumlah lebih dari 65.000 jiwa, sementara jumlah anggota POLSEK hanya sebanyak 14 personil, maka didapat perbandingan 1 ; 4.640. Suatu perbandingan yang amat besar, apabila dilihat ratio perbandingan ideal antara Polri dengan masyarakat yaitu 1 : 1000.

c. Sarana yang kurang Memadai.

Hanya terdapat 1 (satu) buah sepeda motor, yaitu Honda GL 125 tahun 1980, tiga buah mesin ketik manual dan beberapa Alkom (HT) yang terbatas. Dukungan sarana dan prasarana ini sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas Polri, mengingat tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Polri terus meningkat seiring dengan terus berkembangnya masyarakat.

IV. KESIMPULAN.

- a. Perkembangan (pembangunan) wilayah kecamatan Mranggen cukup pesat dibandingkan dengan kecamatan lain diwilayah Kab. Dati II Demak. Pesatnya kemajuan wilayah ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama adalah letaknya yg strategis yaitu berbatasan dengan wilayah Kodja Semarang dan merupakan daerah penyangga, sehingga setiap perubahan yg terjadi di Semarang akan dengan cepat berpengaruh/meresap ke daerah ini. Wilayah ini sangat strategis dari sudut pandang ekonomi (bisnis) karena letaknya tidak jauh (+ 12 km) dari pusat kota (perdagangan) di Semarang. Pesatnya pembangunan ini ternyata menimbulkan dampak negatif seperti masalah urbanisasi, meningkatnya secara tajam jumlah penduduk, pengangguran, kebutuhan lapangan kerja, masalah pencemaran, masalah kesemrawutan (kemacetan) lalu lintas dan sebagainya, yg pada akhirnya dapat menimbulkan kerawanan di bidang sosial maupun politik. Gangguan Kamtibmas dapat muncul setiap saat.
- b. Tugas Polri untuk menyelenggarakan Kamtibmas ini didasarkan pada UU No.13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian RI yaitu

pada pasal 1, 2 dan 18. Selanjutnya tugas Polri ini diatur dalam Keppres RI No.52/1969 juncto Keppres RI No.7/1974. Dari berbagai peraturan tersebut di atas dapat diketahui bahwa tugas utama Polri adalah mengusahakan dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, karena Kamtibmas merupakan prasarat bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat yang teratur. Oleh karena itu kehadiran anggota Polri di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana telah digariskan dalam berbagai peraturan tersebut.

c. Langkah-langkah yg telah diambil Polri dalam melaksanakan tugas itu ialah mengoptimalkan fungsi-fungsi dalam tubuh Polri yaitu fungsi Sabhara, lalu lintas, reserse, intel dan Binmas. Sehubungan dengan pola penyelenggaraan Kamtibmas di mana Polri lebih menekankan pada usaha preventif, maka fungsi yang menonjol adalah Sabhara dan Binmas. Tugas Sabhara adalah melakukan patroli dan pengawasan dalam usaha menangkal/mencegah terjadinya kejahatan dan gangguan Kamtibmas lainnya. Sedangkan dalam kaitannya dengan Binmas ini khusus di Polda Jateng (termasuk di dalamnya Polsek Mranggen) telah diterjunkan petugas Babinkamtibmas di tiap desa/kelurahan. Langkah ini telah ditempuh enam tahun lalu, yaitu dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dengan cara menjemput bola. Di wilayah Polsek Mranggen yang terdiri dari 19 desa, telah diterjunkan sebanyak 13 orang petugas Babinkamtibmas. Hal ini karena terbatasnya jumlah personil yang ada.

d. Hambatan yang dihadapi/ditemui.

- Rendahnya partisipasi masyarakat.
- Terbatasnya jumlah personil Polri, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yg harus dilayani dan luas wilayah kerja Polsek Mranggen.
- Terbatasnya sarana dan prasarana.

Saran-saran.

- a. Sehubungan dengan rendahnya partisipasi masyarakat ini maka perlu dicarikan upaya bagaimana agar partisipasi masyarakat ini semakin meningkat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman dan penjelasan bahwa memelihara keamanan dan ketertiban, bukan semata-mata tanggung jawab Polri saja tetapi merupakan tanggung jawab seluruh rakyat, dan Polri hanya sebagai aparat inti. Sehingga tanpa bantuan masyarakat, tanpa partisipasi masyarakat, sulit bagi Polri untuk dapat berhasil dengan baik.
- b. Melihat pada perkembangan tugas yang dihadapi oleh Polri (Polsek Mranggen) yang semakin besar dan berat, terutama yang diakibatkan oleh tuntutan perkembangan masyarakat, maka untuk dapat menanggulangi masalah-masalah yang timbul, perlu dilakukan usaha-usaha :
- menambah jumlah anggota Polri setahap demi setahap sehingga dicapai perbandingan ideal antara Polri dengan masyarakat yaitu 1 : 1.000.
 - Meningkatkan pengetahuan bagi setiap anggota Polri, terutama bagi petugas dilapangan yang merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan tugas Polri.
 - Meningkatkan sarana tugas, seperti kendaraan bermotor (alat transportasi) dan Alat Komunikasi (Alkom) karena dengan tersedianya alat-alat tersebut dalam jumlah cukup, akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas Polri.
- c. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu digalakkan kegiatan Siskamling yang merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam bidang Kamtibmas.

.ooo00000ooo.

DAFTAR PUSTAKA.

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, DEPKEH, Kamus Hukum Pidana Jakarta, 1985.

ERWIN, SA RUDY T, Tanya Jawab Filsafat Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1979.

KOENTJARANINGRAT, Metode-metode Penelitian Masyarakat, P.T. Gramedia, Jakarta, 1973.

RAHARDJO, SATJIPTO, Masalah Penegakan Hukum, Suatu tinjauan sosiologis, BPHN, 1983.

_____, Hukum dan Perubahan Sosial, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1983.

SOEKANTO, SOERJONO dan ABDULLAH MUSTOFA, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, CV.Rajawali, Jkt, 1980.

SITOMPUL, D.P.M., Hukum Kepolisian Di Indonesia, Suatu Bunga Rampai, Penyunting DPM. Sitompul dan Syahperenong, Tarsito, Bandung, 1985.

SOEMITRO, RONNY HANITIJU, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Smg, 1983.

THE LIANG GIE, Kamus Administrasi, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1968.

KARTINI KARTONO, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Alumni, Bandung, 1983.

UU No.13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian RI.

KEPRES RI No.52/1969

KEPRES RI NO.7/1974